

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah saya analisa mengenai peran POLRI dalam memberantas peredaran minuman keras illegal khususnya di wilayah hukum Polres Sleman Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polres sebagai lembaga penegak hukum dalam memberantas peredaran minuman keras illegal di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta dapat dilihat dari kinerja seluruh jajaran di Polres Sleman Yogyakarta yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengontrol peredaran minuman keras illegal. Dalam hal ini Polres mempunyai dua langkah untuk menanggulangi peredaran minuman keras illegal yang sangat meresahkan masyarakat ini, yaitu dengan Upaya Non Penal dan Upaya Penal. Untuk menanggulangi peredaran minuman keras illegal ini Polres Sleman lebih memaksimalkan pada upaya Non Penal yaitu tindakan preventif (pencegahan) yang dinilai lebih efektif daripada upaya Penal yaitu represif (penindakan).
2. Adapun kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta dalam usahanya memberantas peredaran minuman keras illegal, yaitu antara lain:

a. Kendala Intern.

Yaitu kendala yang berasal dari tubuh Polres itu sendiri, seperti:

1. Keterbatasan jumlah personil yang tidak seimbang dengan masyarakat.
2. Kurangnya koordinasi antar anggota di lapangan pada saat akan mengadakan razia atau operasi-operasi minuman keras.
3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan dalam proses penanggulangan peredaran minuman keras illegal.
4. Adanya oknum yang membocorkan informasi apabila akan diadakannya operasi atau razia minuman keras dan menjadi “backing”.

b. Kendala Ekstern

Yaitu kendala yang berasal dari luar tubuh Polres Sleman Yogyakarta. Antara lain:

1. Modus operandi yang dilakukan para pelaku mengalami peningkatan.
2. Adanya kerjasama dari para pelaku dengan cara bertukar informasi saat akan diadakan razia oleh aparat kepolisian.
3. Adanya diskriminasi yang terjadi dalam penjualan minuman keras di tempat-tempat tertentu, seperti hotel berbintang.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pengurusan SIUP-MB.

5. Kurang adanya keberanian dari masyarakat untuk melaporkan adanya penjualan minuman keras illegal di wilayahnya kepada aparat kepolisian.
6. Peraturan-peraturan serta sanksi-sanksi yang ada tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana minuman keras karena hanya melarang peredaran minuman keras secara illegal atau tidak memiliki surat izin perdagangan minuman keras, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku.

## **B. Saran**

Penanggulangan terhadap peredaran minuman keras ini tidak hanya merupakan tugas dari POLRI saja, akan tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Dalam bagian akhir penulisan hukum ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Polres Sleman Yogyakarta harus lebih melakukan pembenahan di dalam jajarannya sehingga dapat lebih profesional dan tidak ada lagi alasan masalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, serta keterbatasan jumlah personil. Pada intinya kendala-kendala intern tersebut harus segera diatasi supaya tidak menghambat kinerja anggota Polres Sleman Yogyakarta itu sendiri.
2. Anggota Sat Reskrim Polres Sleman Yogyakarta harus lebih giat mengadakan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat mengenai minuman keras, akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

3. Tindakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras secara ilegal harus lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan secara rutin.
4. Dukungan serta kerjasama dari organisasi kemasyarakatan terutama organisasi kepemudaan sangat diharapkan untuk dapat terlibat membantu dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras yang dilakukan secara ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Soekamto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M.Karyadi, 1978, *Polisi (filsafat hukum dan perkembangannya)*, Politea, Bogor.
- Momo Kelenia, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT.Grasindo, Jakarta.
- H.Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- H.Warsito Hadi Utomo, 2005, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV.Sahabat, Semarang.
- Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Management Kepolisian Negara RI Dalam Era Reformasi*, Brata Bhakti, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suryono Sukamto, 1998, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sitompul dan Edward Syah Pernong, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, Transito, Bandung.
- M.Arif Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Anggota IKAPI, Bandung.
- I Gusti K.Alit, 1997, *Penyalahgunaan Ecstasy, Minuman Keras dan Bahaya AIDS dikalangan Generasi Muda*, Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta.

Jeanne.M, dkk, 1996, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif lainnya: Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan

Keppres RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/1977 Tahun 1977 tentang Minuman Keras

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 641/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1516/A/K/V/1981 tentang Anggur dan sejenisnya serta penggunaan ethanol dalam obat dan obat tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1700/B/SK/VIII/1982 tentang Kriteria Penolakan Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman Keras dan Makanan yang mengandung alkohol

Keputusan Direktur Jenderal POM Nomor 153/B/SK/1980 tentang Tata Cara Perizinan Minuman Keras